

Strategi Kolaboratif Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam Upaya Penanggulangan Terorisme untuk Memperkuat Keamanan Nasional

Irfan Fahmi Nooryadi¹ Ahmad G Dohamid² Mitro Prihartoro³

Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: ifahmi263@gmail.com¹

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasional Indonesia yang melibatkan aspek ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Kompleksitas ancaman ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai institusi, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif antara Kemhan dan BNPT dalam penanggulangan terorisme serta mengevaluasi dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai pendekatan utama. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola kolaborasi dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Kemhan dan BNPT diwujudkan melalui perumusan kebijakan bersama, pelaksanaan operasi terpadu, penguatan intelijen, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun kolaborasi ini memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan ancaman, efektivitas penindakan, dan penguatan ketahanan sosial, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi kolaboratif yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan koordinasi kelembagaan, pengembangan kebijakan lintas sektoral, dan penguatan sumber daya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis dalam merumuskan strategi penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: BNPT, Keamanan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kolaborasi Kelembagaan, Penanggulangan Terorisme

Abstract

Terrorism is one of the primary threats to Indonesia's national security, involving ideological, social, political, and economic aspects. The complexity of this threat necessitates a comprehensive approach involving various institutions, including the Ministry of Defense (Kemhan) and the National Counter-Terrorism Agency (BNPT). This study aims to analyze the collaborative strategies between Kemhan and BNPT in counterterrorism efforts and evaluate their impact on strengthening national security. Using a qualitative research method and literature review as the primary approach, data were analyzed through content analysis to identify collaboration patterns and challenges. The findings indicate that the collaboration between Kemhan and BNPT is implemented through joint policy formulation, integrated operations, intelligence strengthening, and community empowerment. While this collaboration has positively contributed to threat prevention, effective action, and social resilience, challenges such as overlapping authority and resource limitations remain obstacles. The study concludes that a more structured and technology-based collaborative strategy is required to enhance counterterrorism effectiveness. Recommendations include improving institutional coordination, developing cross-sectoral policies, and strengthening resources. This study is expected to serve as an academic and practical reference for formulating counterterrorism strategies in Indonesia.

Keywords: BNPT, Counterterrorism, Institutional Collaboration, Ministry of Defense, National Security



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasional di Indonesia. Ancaman ini bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aspek ideologi, sosial, politik, dan ekonomi. Terorisme tidak hanya menargetkan infrastruktur strategis tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya yang multidimensi memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab atas keamanan nasional (Jones, 2020). Di Indonesia, penanggulangan terorisme membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai institusi, di antaranya Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kolaborasi antara kedua lembaga ini sangat penting dalam memperkuat sistem pertahanan dan menjaga keamanan nasional. Kementerian Pertahanan bertanggung jawab dalam aspek pertahanan dan keamanan fisik, sementara BNPT fokus pada pencegahan dan penanggulangan ideologi radikal yang dapat memicu terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kolaboratif antara Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam penanggulangan terorisme dan dampaknya terhadap penguatan keamanan nasional Indonesia (Mahendra, 2023). Kementerian Pertahanan (Kemhan) memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang responsif terhadap ancaman terorisme. Melalui kebijakan pertahanan nasional, Kemhan memastikan kesiapan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman yang bersifat asimetris seperti terorisme. Pendekatan ini mencakup peningkatan kapasitas militer dan penguatan ketahanan masyarakat sebagai bagian dari strategi total defense (Sukma, 2021).

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki mandat khusus dalam menangani ancaman terorisme secara komprehensif. BNPT fokus pada upaya pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan organisasi internasional. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi akar penyebab terorisme dan mencegah penyebaran ideologi radikal (BNPT, 2022). Namun, meskipun Kemhan dan BNPT memiliki peran yang strategis, koordinasi antara kedua lembaga ini masih menghadapi tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya tumpang tindih peran dan kurangnya sinkronisasi dalam implementasi kebijakan sering kali menghambat efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia (Hidayat & Pratama, 2023). Misalnya, perbedaan pendekatan antara penanganan berbasis militer dan penanganan berbasis komunitas sering kali menciptakan celah dalam kebijakan. Kolaborasi yang lebih erat antara Kemhan dan BNPT sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pendekatan kolaboratif dapat memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan langkah-langkah mitigasi ancaman terorisme yang lebih terintegrasi. Kerjasama ini juga penting untuk menyelaraskan upaya penanggulangan dengan doktrin pertahanan nasional yang holistik (Setiawan, 2020). Selain itu, pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu elemen kunci dalam melawan ideologi radikal. BNPT telah menginisiasi program-program deradikalisasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan organisasi lokal. Di sisi lain, Kemhan dapat memperkuat program ini dengan memberikan dukungan melalui program bela negara yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme (Anwar & Suryadi, 2022).

Pentingnya kolaborasi juga sejalan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dan intelijen modern dalam memerangi terorisme. Teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman lebih awal, sementara intelijen diperlukan untuk memahami jaringan dan pola operasional kelompok teroris. Dalam hal ini, sinergi antara Kemhan yang memiliki kapasitas teknologi pertahanan dan BNPT sebagai pusat penanggulangan terorisme sangat krusial (Hasanuddin, 2023). Dengan demikian, terorisme tetap menjadi ancaman signifikan

yang memerlukan pendekatan multidimensi dan kolaboratif. Keberhasilan dalam penanganannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusional tetapi juga oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika ancaman yang terus berubah. Kolaborasi strategis antara Kemhan dan BNPT menjadi kunci dalam menjaga keamanan nasional dan mencegah berkembangnya ideologi teroris di Indonesia (Jones, 2020).

Rumusan Masalah: Dari penjelasan peneliti maka peneliti merumuskan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana bentuk strategi kolaboratif antara Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam upaya penanggulangan terorisme? Apa dampak strategi kolaboratif tersebut dalam memperkuat keamanan nasional? **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kolaboratif antara Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam penanggulangan terorisme serta mengevaluasi kontribusi kolaborasi tersebut terhadap keamanan nasional. **Manfaat Penelitian:** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah kolaboratif untuk penanggulangan terorisme di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Teori Strategi

Teori strategi telah menjadi dasar dalam memahami upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan sumber daya yang tersedia. Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda tentang strategi. Carl von Clausewitz dalam *On War* mendefinisikan strategi sebagai seni menggunakan pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Strategi, menurut Clausewitz, melibatkan pengintegrasian elemen-elemen politik, ekonomi, dan militer dalam rangka mencapai kepentingan nasional (Clausewitz, 1832/1984). Sun Tzu dalam *The Art of War* menekankan pentingnya fleksibilitas, analisis situasi, dan keunggulan moral dalam strategi. Ia mengajarkan bahwa kemenangan dapat diraih tanpa bertempur melalui manipulasi kekuatan lawan (Sun Tzu, n.d.)

Teori Kolaboratif

Kolaborasi dianggap sebagai cara efektif untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Barbara Gray (1989) dalam bukunya *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems* menjelaskan kolaborasi sebagai proses interaktif di mana pihak-pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu (Gray, 1989). Chris Huxham dan Siv Vangen dalam *Managing to Collaborate* menyoroti kompleksitas kolaborasi, termasuk kebutuhan akan kepercayaan, koordinasi, dan upaya mengelola ketegangan antara tujuan individu dan kolektif (Huxham & Vangen, 2005). Jean Monnet, dalam konteks integrasi Eropa, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk mengatasi tantangan bersama melalui pembangunan institusi kolektif (Monnet, 1978).

Teori Teroris

Dalam studi terorisme, beberapa ahli memberikan pandangan penting terkait definisi, karakteristik, dan motivasi terorisme. Bruce Hoffman dalam *Inside Terrorism* mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan yang direncanakan, bermotif politik, dan dilakukan untuk memengaruhi audiens di luar target langsung. Hoffman juga membahas terorisme global yang bersifat transnasional (Hoffman, 2017). Walter Laqueur dalam *The Age of Terrorism* menekankan bahwa terorisme adalah fenomena dinamis dengan dimensi ideologis, religius, dan ekonomi (Laqueur, 1996). Martha Crenshaw menggunakan pendekatan *rational choice* untuk menjelaskan bahwa terorisme adalah pilihan strategis untuk mencapai tujuan politik tertentu oleh kelompok yang merasa tidak memiliki alternatif lain (Crenshaw, 1981).

Teori Keamanan Nasional

Keamanan nasional merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan strategis global. Beberapa pandangan utama tentang teori keamanan nasional. Barry Buzan dalam *People, States, and Fear* menjelaskan bahwa keamanan nasional mencakup dimensi militer, ekonomi, lingkungan, dan politik, serta bagaimana negara melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal (Buzan, 1991). Hans Morgenthau, sebagai bapak realisme, melihat keamanan nasional sebagai upaya negara untuk menjaga kekuasaan melalui diplomasi dan kekuatan militer (Morgenthau, 1948). Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa teori strategi, kolaborasi, terorisme, dan keamanan nasional memiliki relevansi lintas disiplin. Integrasi dari berbagai teori ini dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika global dan lokal. Dengan memahami teori-teori ini, penelitian lebih lanjut dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi penanggulangan terorisme dan kolaborasi kelembagaan antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam konteks kebijakan keamanan nasional. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan tahunan yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan empiris yang mendukung analisis penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi antara Kemhan dan BNPT dalam konteks penanggulangan terorisme. Proses analisis mencakup pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, dan interpretasi temuan berdasarkan kerangka konseptual yang telah ditentukan. Interpretasi dilakukan untuk merumuskan temuan penelitian terkait strategi kolaboratif kedua lembaga tersebut serta dampaknya terhadap keamanan nasional. Pendekatan ini sesuai dengan panduan penelitian kualitatif, yang menekankan pentingnya interpretasi mendalam terhadap data tekstual untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan bersama yang terintegrasi. Kementerian Pertahanan, sebagai lembaga yang menangani aspek pertahanan fisik, memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan melakukan tindakan preventif terhadap ancaman terorisme yang dapat merusak kedaulatan negara. Di sisi lain, BNPT fokus pada pencegahan radikalisme dengan pendekatan yang lebih berbasis pada sosialisasi dan pemulihan individu-individu yang terpapar radikalisme (Barton, 2019). Kolaborasi antara kedua lembaga ini diwujudkan melalui berbagai program bersama, seperti penyelenggaraan pelatihan bagi aparat keamanan, pertukaran informasi mengenai potensi ancaman, dan penguatan koordinasi dalam operasi penanggulangan terorisme. Salah satu contoh kolaborasi yang cukup signifikan adalah program *Desa Siap Siaga* yang dilaksanakan oleh BNPT, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman terorisme. Kementerian Pertahanan memberikan dukungan dalam hal pelatihan militer dan penanggulangan situasi darurat yang melibatkan terorisme (Yusuf, 2020). Dalam upaya memperkuat keamanan nasional, strategi kolaboratif ini sangat penting untuk

memastikan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap ancaman terorisme. Kolaborasi yang terorganisir dan terstruktur memungkinkan kedua lembaga untuk bekerja dengan lebih sinergis dalam menciptakan sistem pertahanan yang lebih kuat dan tahan terhadap ancaman eksternal maupun internal.

Kolaborasi Kementerian Pertahanan dan BNPT dalam Penanggulangan Terorisme

Kolaborasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanggulangan terorisme di Indonesia diwujudkan melalui berbagai upaya strategis yang melibatkan sinergi lintas kelembagaan. Salah satu bentuk kolaborasi adalah melalui perumusan kebijakan bersama. Kemhan dan BNPT bekerja sama dalam merancang kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan upaya pertahanan negara dan penanggulangan terorisme secara komprehensif. Proses ini melibatkan koordinasi yang intensif untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Pelaksanaan operasi terpadu menjadi salah satu implementasi konkret dari kolaborasi ini. Operasi tersebut melibatkan unsur pertahanan negara dan penegakan hukum dalam menangani ancaman terorisme, termasuk penindakan langsung terhadap jaringan teroris dan pelaksanaan program deradikalisasi bagi individu atau kelompok yang terpapar ideologi radikal. Pendekatan terpadu ini memungkinkan penggunaan berbagai sumber daya secara efisien untuk menghadapi ancaman yang bersifat kompleks (Anwar & Suryadi, 2022).

Penguatan intelijen juga menjadi aspek penting dalam kolaborasi antara Kemhan dan BNPT. Kedua lembaga ini saling bertukar informasi intelijen untuk memetakan jaringan terorisme serta memahami pola dan strategi kelompok radikal. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi ancaman, sehingga efektivitas penanggulangan terorisme dapat ditingkatkan secara signifikan (Hasanuddin, 2023). Pemberdayaan masyarakat juga menjadi elemen utama dalam memperkuat ketahanan terhadap ideologi radikal. Kemhan dan BNPT berkolaborasi dalam melaksanakan program-program sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait ancaman radikalisme dan terorisme. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran ideologi radikal, yang sejalan dengan pendekatan berbasis komunitas untuk menghadapi ancaman terorisme (BNPT, 2022).

Tantangan dalam Kolaborasi Kemhan dan BNPT

Kolaborasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanggulangan terorisme di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas kerja sama. Salah satu tantangan utama adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga. Kemhan dan BNPT memiliki irisan tugas dan fungsi yang terkadang menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Tumpang tindih ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan dan operasi, sehingga diperlukan upaya untuk memperjelas batas-batas kewenangan melalui regulasi yang lebih terintegrasi. Koordinasi yang kurang optimal menjadi kendala dalam memastikan sinergi yang efektif antara kedua lembaga. Perbedaan pendekatan dalam penanganan terorisme, baik yang berbasis militer maupun berbasis komunitas, sering kali menciptakan tantangan dalam menyelaraskan strategi. Kendala birokrasi juga memperlambat proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya berdampak pada respons yang tidak cukup cepat terhadap ancaman terorisme (Hidayat & Pratama, 2023). Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personel, maupun teknologi yang mendukung operasi bersama. Operasi penanggulangan terorisme membutuhkan alokasi sumber daya yang signifikan, termasuk pendanaan untuk pelatihan,

pengadaan peralatan modern, dan pengembangan teknologi intelijen. Keterbatasan ini sering kali menjadi hambatan dalam memastikan efektivitas operasional, terutama dalam menangani ancaman yang bersifat kompleks dan terus berkembang (Hasanuddin, 2023). Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kolaborasi antara Kemhan dan BNPT melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efisien, dan berbasis sumber daya yang memadai. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penanggulangan terorisme dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dampak Strategi Kolaboratif terhadap Keamanan Nasional

Kolaborasi yang efektif antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keamanan nasional. Salah satu dampak utama dari kolaborasi ini adalah pencegahan yang lebih proaktif terhadap ancaman terorisme. Melalui sinergi dalam pertukaran informasi intelijen, ancaman potensial dapat diidentifikasi lebih dini, memungkinkan langkah pencegahan yang lebih terencana dan responsif. Pendekatan ini mengurangi risiko serangan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas negara (Jones, 2020). Selain itu, penindakan terhadap ancaman terorisme menjadi lebih efektif dengan adanya operasi terpadu antara kedua lembaga. Operasi bersama yang melibatkan unsur pertahanan dan penegakan hukum memastikan tindakan yang lebih terkoordinasi dalam menangani kelompok terorisme. Efektivitas ini mencakup baik aspek teknis dalam pelaksanaan operasi maupun pendekatan strategis untuk melemahkan jaringan teroris (Hasanuddin, 2023). Kolaborasi ini juga berdampak pada penguatan resiliensi masyarakat terhadap ideologi radikal. Melalui program-program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan bersama, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai ancaman radikalisme dan bagaimana cara berperan aktif dalam mencegahnya. Pendekatan berbasis komunitas ini meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi mereka dalam menjaga keamanan lokal, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial (Anwar & Suryadi, 2022). Secara keseluruhan, strategi kolaboratif ini memberikan dampak positif terhadap stabilitas nasional. Dengan menurunnya ancaman terorisme, stabilitas politik, ekonomi, dan sosial dapat lebih terjamin. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan nasional dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjaga keamanan negara. Stabilitas yang terjaga juga menjadi elemen penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi strategis antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki peran penting dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti perumusan kebijakan bersama, pelaksanaan operasi terpadu, penguatan intelijen, dan pemberdayaan masyarakat. Meski demikian, tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Meskipun menghadapi tantangan, kolaborasi ini terbukti memberikan dampak positif, termasuk pencegahan ancaman yang lebih proaktif, penindakan yang lebih efektif, penguatan resiliensi masyarakat terhadap radikalisme, dan terjaganya stabilitas nasional. Dengan mengatasi hambatan yang ada, kolaborasi Kemhan dan BNPT dapat lebih dioptimalkan untuk memastikan keamanan nasional yang berkelanjutan serta kesiapan negara dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Saran

1. Peningkatan Koordinasi Kelembagaan. Disarankan agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan mekanisme kerja bersama yang lebih terstruktur dan efisien. Hal ini dapat diwujudkan melalui forum komunikasi rutin, penetapan standar operasional prosedur (SOP) terpadu, serta pembagian kewenangan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih peran.
2. Penyempurnaan Kebijakan Lintas Sektoral. Pemerintah perlu menyusun dan menyempurnakan kebijakan yang mengintegrasikan berbagai pendekatan, baik yang bersifat militer maupun non-militer, untuk menangani ancaman terorisme. Kebijakan ini harus mampu mencakup aspek pencegahan ideologi radikal, pemberantasan terorisme, hingga penguatan ketahanan sosial melalui sinergi dengan komunitas lokal dan organisasi masyarakat.
3. Penguatan Sumber Daya dan Teknologi. Kemhan dan BNPT memerlukan alokasi sumber daya yang lebih memadai, termasuk anggaran, personel yang terlatih, serta peralatan dan teknologi canggih untuk mendukung operasional bersama. Fokus pada pengembangan teknologi intelijen dan keamanan siber sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah ancaman secara lebih efektif.
4. Pengembangan Program Berbasis Komunitas. Program-program berbasis komunitas, seperti sosialisasi dan deradikalisasi, perlu diperluas dan diperdalam dengan melibatkan tokoh agama, pemuda, dan organisasi masyarakat. Kemhan dapat memberikan dukungan melalui program bela negara, sementara BNPT dapat memperkuat pendekatan deradikalisasi berbasis dialog untuk menjangkau kelompok yang rentan terhadap radikalisasi.
5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Pelatihan gabungan antara Kemhan dan BNPT harus diperluas untuk memastikan personel dari kedua lembaga memiliki pemahaman yang sama tentang strategi penanggulangan terorisme. Pelatihan ini juga dapat mencakup aspek komunikasi lintas lembaga untuk meningkatkan koordinasi operasional.
6. Peningkatan Kerja Sama Internasional. Disarankan agar Kemhan dan BNPT memperluas kerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara sahabat untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman terbaik dalam penanggulangan terorisme. Kerja sama ini juga dapat mencakup penguatan pengawasan terhadap jaringan teroris lintas negara.
7. Evaluasi dan Monitoring Berkala. Pemerintah perlu membangun sistem evaluasi dan monitoring berkala terhadap pelaksanaan kolaborasi Kemhan dan BNPT. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kolaborasi antara Kemhan dan BNPT, sehingga mampu menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Suryadi, T. (2022). *Community-based deradicalization programs in Indonesia*. Jakarta: Research Center for Security Studies.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022). *Laporan tahunan BNPT 2022*. Jakarta: BNPT.

- Barton, P. (2019). The role of national counter-terrorism agencies in preventing radicalization. *International Security Review*, 23(2), 34-45.
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Clausewitz, C. v. (1984). *On War* (M. Howard & P. Paret, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832).
- Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. *Comparative Politics*, 13(4), 379-399.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Jossey-Bass.
- Hasanuddin, A. (2023). *The role of technology and intelligence in counter-terrorism*. Yogyakarta: Defense and Security Institute.
- Hidayat, R., & Pratama, D. (2023). Policy integration in counter-terrorism measures: A case study of Indonesia. *Jakarta: National Defense Journal*.
- Hoffman, B. (2017). *Inside Terrorism* (3rd ed.). Columbia University Press.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2005). *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*. Routledge.
- Jones, S. (2020). *Terrorism in Southeast Asia: Challenges and responses*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Laqueur, W. (1996). *The Age of Terrorism*. Little, Brown and Company.
- Mahendra, R., Widodo, P., Saragih, H. J. R., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2023). Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme dan Terorisme oleh BNPT di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 204-212.
- Monnet, J. (1978). *Memoirs*. Collins.
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Porter, M. E. (1996). What is strategy? *Harvard Business Review*, 74(6), 61-78.
- Setiawan, B. (2020). *Total defense strategy in facing asymmetric threats*. Bandung: Indonesian Defense University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, R. (2021). *Indonesia's defense policy: Towards a comprehensive approach*. Jakarta: National Defense Policy Institute.
- Sun Tzu. (n.d.). *The Art of War*. Translated by Lionel Giles.
- Yusuf, I. (2020). Strategi kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. *Journal of Indonesian Security Studies*, 15(1), 67-80.